



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SLAMET PUDJA RAHARDJO**
2. Jabatan : **KEPALA UNIT**
3. NHK : **259001**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. **3.500.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 210 m2/230 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, LAINNYA Rp. 1.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/220 m2 di KAB / KOTA KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/250 m2 di KAB / KOTA KOTA CIREBON , WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **15.000.000**

1. MOTOR, HONDA VARIO SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, SUZUKI SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **42.000.000**

D. SURAT BERHARGA Rp. **---**

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. **1.200.000**

F. HARTA LAINNYA Rp. **50.000.000**

Sub Total Rp. **3.608.200.000**

III. HUTANG Rp. **148.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **3.460.200.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.